

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT BPK ATAS LKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (TAHUN 2024-2025)

Susana P. Baso¹, Yohanes E. Semi², Jeanet J. S. Loinenak³, Larasati V. Bolla⁴, Melkianus N. Kabba⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira

Email: Purnamabaso@gmail.com¹, semieudesyohanes@gmail.com², jeanetloinenak@gmail.com³,
larasbolla@gmail.com⁴, melkikabba@gmail.com⁵.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi pendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data melalui studi dokumen terhadap LKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, wawancara mendalam dengan pegawai yang mengurus keuangan daerah serta auditor, dan pengamatan tidak langsung. Proses analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat audit BPK terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh beberapa hal utama, yaitu kualitas penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah. Dari hasil audit BPK tahun 2024, terlihat masih ada kelemahan dalam pengelolaan aset, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap aturan. Namun, pada tahun 2025 berangsur ada perbaikan karena adanya tindak lanjut dari rekomendasi BPK, peningkatan pengawasan internal, dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat audit BPK tidak hanya menggambarkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam suatu periode tertentu, tetapi juga mencerminkan hasil dari upaya perbaikan manajemen keuangan daerah secara terus-menerus.

Kata Kunci: Opini Audit BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Regulasi, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

This study aims to examine the factors influencing the audit opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) on Regional Government Financial Reports (LKPD) in East Nusa Tenggara Province in 2024-2025. The method used is a descriptive qualitative approach, by collecting data through document studies of LKPD and BPK Audit Reports (LHP), in-depth interviews with employees who manage regional finances and auditors, and indirect observation. The data analysis process was carried out using the Miles and Huberman model, which includes three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the Supreme Audit Agency (BPK)'s audit opinion on the Regional Financial Report (LKPD) of East Nusa Tenggara Province is influenced by several key factors, namely the quality of financial report presentation in accordance with Government Accounting Standards (SAP), the effectiveness of the internal control system, the level of compliance with laws and regulations, and the ability of human resources to manage regional finances. The 2024 BPK audit results revealed weaknesses in asset management, the internal control system, and regulatory compliance. However, improvements gradually emerged in 2025 due to follow-up on BPK recommendations, enhanced internal oversight, and increased capacity of regional financial

officials. This study concludes that the BPK's audit opinion not only reflects whether the financial statements are presented fairly for a given period but also reflects the results of ongoing efforts to improve regional financial management.

Keywords: *Audit Opinion of the Audit Board of Indonesia Regional Government Financial Report, Internal Control System, Regulatory Compliance, Human Resources.*

PENDAHULUAN

Untuk Mencapai Tata Kelola yang Baik, Pemerintah Daerah harus terus berusaha dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup berbagai aspek teknis, seperti Peraturan, Kelembagaan, Sistem Informasi Keuangan, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Juli et al., 2010).

Laporan keuangan itu sendiri adalah sebuah sumber informasi penting dalam pembuatan kebijakan dan menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan oleh institusi atau organisasi. Laporan keuangan harus bersifat jujur dan tidak terlibat dalam tindakan curang dari pihak manapun (Kompas, 2019). Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan merupakan pernyataan dari pihak Manajemen Pemerintah yang memberikan Informasi kepada pihak lain, yaitu para Pemangku Kepentingan, mengenai kondisi Keuangan Pemerintah. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, dalam menyusun sistem akuntansi pada pemerintah daerah merujuk pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, dengan kurun waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 23E Ayat 1, BPK didirikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan otonomi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Faizal, Ni, Amalyh, Firnanda, & Putri, 2025).

Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tersebut disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kualitas dari laporan keuangan tersebut ditunjukkan melalui opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu memiliki relevansi, dapat dipercaya, dapat dinilai atau dibandingkan, serta mudah dipahami. Keempat kriteria tersebut sangat penting dalam pembentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Tujuan BPK

melakukan pemeriksaan adalah untuk memberikan pendapat berupa pernyataan profesional dari auditor mengenai apakah informasi keuangan dalam laporan keuangan itu secara keseluruhan wajar atau tidak. Hasil dari pemeriksaan keuangan adalah bentuk opini. Dengan adanya opini dari BPK, maka dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan daerah itu sudah baik atau belum, dan sekaligus dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya akan menghasilkan kesimpulan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, terdapat empat jenis opini terhadap laporan keuangan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Audit & Pemda, n.d.).

Laporan audit adalah cara yang digunakan auditor untuk berkomunikasi dengan lingkungan kerjanya. Menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007), opini audit adalah laporan yang diberikan oleh seorang akuntan publik yang terdaftar, sebagai hasil dari penilaian mereka terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit, sehingga mereka dapat memberikan kesimpulan mengenai opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan auditor berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan pendapat mereka, atau apabila situasi memang mengharuskan, menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan pendapat. Auditor menyatakan pendapat berdasarkan hasil audit yang dilakukan sesuai dengan standar auditing serta temuan-temuan yang ditemukan selama proses audit (Wulandari, 2021).

Opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan hasil dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu institusi. Opini ini sangat penting karena memberikan penilaian yang independen terhadap kualitas dan kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh institusi tersebut. Opini audit ini disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang mencakup kesimpulan serta temuan-temuan yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Opini BPK tentu didasarkan pada banyak informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, tidak semua pemerintah daerah memberikan semua informasi yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan mereka. Meskipun penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan untuk perusahaan sudah banyak dilakukan, penelitian terkait pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, terutama di Indonesia, masih sangat terbatas (Ekonomika, Bisnis, & Diponegoro, 2015).

Laporan keuangan pemerintah seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna agar dapat menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi tersebut mencakup :

1. Informasi mengenai sumber, penggunaan, dan penyebaran sumber daya keuangan.
2. Informasi mengenai cukup tidaknya penerimaan yang ada untuk membiayai seluruh kebutuhan pengeluaran.
3. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam berbagai kegiatan dan hasil yang telah dicapai.
4. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Informasi mengenai kondisi finansial entitas pelaporan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari penerimaan pajak dan pinjaman.

6. Informasi mengenai perubahan kondisi finansial entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai hasil dari kegiatan selama periode pelaporan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas dari suatu entitas pelaporan (Ekonomika et al., 2015).

KAJIAN TEORI

Opini Audit

Opini adalah salah satu jenis laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, opini adalah pernyataan profesional yang menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan sudah cukup wajar. Audit kinerja pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan. Opini audit membantu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan opini audit bisa dibagi menjadi empat kategori, yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (atau opini bersih), opini tidak memenuhi syarat dengan paragraf penjelasan, opini audit berkualitas (dengan atau tanpa paragraf penjelasan), dan opini going concern. Menurut Agoes (2014:75), opini audit terdiri dari : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan keuangan disusun secara wajar sesuai standar Ini adalah opini terbaik yang diberikan auditor. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) Auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan keuangan yang diaudit, karena ada keadaan tertentu. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan keuangan disusun secara wajar, kecuali ada hal yang dikemukakan dalam pengecualian. Tidak Wajar Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak wajar, sehingga tidak sesuai dengan standar. Tidak Memberikan Pendapat Auditor tidak bisa mengevaluasi laporan keuangan secara wajar, sehingga tidak memberikan pendapat. Ini adalah opini terburuk yang dikeluarkan auditor (Jurnal, Vol, Oktober, Daerah, & Jawa, 2020).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah hasil dari tanggung jawab para penyusunnya. Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga keuangan mikro lokal adalah hasil dari proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu tahap identifikasi dokumen, tahap pencatatan jurnal, serta periode akuntansi untuk setiap akun. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, entitas yang menyusun laporan keuangan harus disusun dan didefinisikan sesuai dengan situasi keuangan dan transaksi yang terjadi. Shahan (2008) mengatakan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi tersebut bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan pemerintah jika laporan keuangan tersebut dibuat setelah melewati siklus akuntansi yang dilakukan di pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ciri kualitatif yang menunjukkan posisi keuangan, kinerja, serta informasi lain yang dihasilkan dari berbagai akun tersebut. Keputusan dalam membuat laporan keuangan juga tergantung pada proses pengelolaan keuangan. Di sisi lain, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan tersebut harus memiliki empat karakteristik, yaitu (1) dapat diandalkan, (2) relevan, (3) mudah dipahami, dan (4) sebanding. Kualitas laporan keuangan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat akuntabilitas. Kualitas pelaporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab atau kewajiban dari penyusun laporan tersebut. Secara umum, kualitas laporan keuangan daerah merupakan ciri kualitatif dari proses akuntansi, di mana akuntabilitas dan transparansi saling berkaitan. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah, semakin baik tingkat akuntabilitas dan transparansi, sebaliknya jika kualitas laporan keuangan rendah, maka akuntabilitas dan transparansi juga akan menurun (Muhasaba & Akuntansi, 2021).

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh manusia dan sistem teknologi informasi. Tujuannya adalah membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern berperan dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Salah satu fungsi pengendalian intern adalah mengantisipasi kecurangan serta kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Dengan adanya pengendalian piutang, kerugian akibat piutang tak tertagih dapat diminimalisir. Pengendalian intern dalam perusahaan merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan manajemen yang berlaku (Hamel et al., n.d.).

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu aset penting dalam perusahaan yang mendukung berjalannya operasional perusahaan. Tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang handal dan berkompeten, organisasi perusahaan tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik. Dalam persaingan bisnis saat ini, setiap perusahaan berusaha dan diharuskan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat dan berkompeten agar dapat mendorong keberhasilan usaha mereka dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Pengelolaan sumber daya manusia harus mendapat perhatian lebih oleh perusahaan agar organisasi bisa mencapai visi dan misi serta tujuan perusahaan secara efektif. Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara terprogram dan komprehensif. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dilakukan secara strategis dan sistematis terkait dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, dengan memanfaatkan sumber informasi yang tepat. Penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik juga mampu mendorong kontribusi karyawan terhadap suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara dalam faktor-faktor yang memengaruhi opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena dengan lebih lengkap, melalui pengamatan langsung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta analisis dokumen resmi terkait proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan daerah.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, fokus pada instansi yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan dan pelaksanaan audit, seperti BPKAD Provinsi NTT, Inspektorat Daerah, dan BPK Perwakilan NTT.

Data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki peran langsung dalam proses penyusunan atau pemeriksaan LKPD, seperti pejabat atau staf BPKAD, auditor BPK, dan pejabat Inspektorat Daerah. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria profesionalitas, pengalaman, dan pengetahuan mereka tentang pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup LKPD, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta literatur pendukung lainnya. Selain wawancara dan dokumentasi, peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif untuk memahami situasi nyata terkait proses penyusunan laporan keuangan dan aktivitas pengawasan internal di pemerintah daerah.

Pengolahan data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyaring, menumpuk fokus, dan menyederhanakan data dari wawancara dan dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi opini audit. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi untuk menjelaskan hubungan antar faktor dan memperkuat argumen penelitian. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti merangkum temuan utama berdasarkan pola dan tema yang muncul dari proses analisis. Untuk memastikan keandalan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik, melakukan pemeriksaan kembali ke informan, serta berdiskusi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan objektivitas interpretasi.

Seluruh proses penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian seperti menjaga kerahasiaan informan, meminta persetujuan sebelum wawancara, serta menggunakan data hanya untuk tujuan ilmiah. Dengan pendekatan dan metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi opini audit BPK terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta ditambah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang secara langsung terlibat dalam proses menyusun dan memeriksa laporan keuangan daerah. Dari hasil analisis tersebut, peneliti menemukan beberapa faktor utama yang sangat memengaruhi opini audit BPK terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Faktor pertama yang mempengaruhi terkait Dengan judul yang diambil oleh peneliti adalah kualitas penyajian laporan keuangan. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan LKPD Provinsi NTT secara umum sudah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Meskipun demikian, Masih Terdapat Beberapa kelemahan dalam penjelasan informasi di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Seperti Dalam pencatatan aset tetap dan kewajiban jangka panjang.

Kelemahan Tersebut menjadi salah satu alasan yang dipertimbangkan BPK dalam memberikan opini audit.

Faktor kedua yang sangat mempengaruhi adalah sistem pengendalian internal. Menurut hasil pemeriksaan LHP BPK, masih Terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, Terlebih khususnya dalam mengelola aset daerah, mencatat uang kas, serta mengawasi pelaksanaan anggaran. Kelemahan ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, sehingga memengaruhi kelayakan laporan keuangan.

Faktor keempat adalah kemampuan Pegawai yang mengelola Keuangan Daerah. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap Regulasi Akuntansi pemerintahan dan sistem pelaporan keuangan masih menjadi hambatan. Selain itu, pergantian pejabat pengelola keuangan yang sering terjadi juga membuat proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah tidak berjalan secara optimal.

Dapat Dilihat bahwa, hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat Beberapa Faktor yang mempengaruhi opini audit BPK terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Seperti ketelitian dalam pengelolaan Akuntansi, keefektifan sistem pengendalian internal, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Daerah. Interaksi antar faktor ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dan 2025. Opini audit yang diberikan tidak hanya menilai apakah penyajian laporan keuangan dalam kondisi yang wajar, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan dari audit pada periode tersebut, khususnya dalam hal pengelolaan aset, kesesuaian dengan regulasi, serta efektivitas pengendalian internal, menunjukkan bahwa perbaikan yang telah dilakukan pemerintah daerah dari tahun 2024 ke tahun 2025 berdampak positif terhadap kualitas opini audit yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam mendorong rekomendasi BPK, peningkatan kompetensi petugas keuangan, serta penguatan pengawasan internal menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas opini audit di masa depan. Dengan demikian, opini audit BPK tahun 2024 dan 2025 tidak hanya menilai laporan keuangan pada tahun tertentu, tetapi juga mencerminkan hasil dari proses perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Pembahasan ini menghubungkan hasil penelitian dengan pendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pendapat BPK mencerminkan tingkat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang dinilai berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan informasi dalam laporan keuangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penyajian LKPD Provinsi NTT sudah mengikuti SAP berbasis akrual seperti yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Meski demikian, masih ada kelemahan dalam pengungkapan informasi di Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), terutama terkait pencatatan dan penilaian aset tetap serta kewajiban jangka panjang. Temuan ini sesuai dengan pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit, karena ketidaklengkapan atau ketidaktepatan pengungkapan bisa berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Tahun 2024, kelemahan dalam pengelolaan dan penatausahaan aset daerah masih menjadi catatan penting BPK, sehingga opini yang diberikan mencerminkan adanya penekanan

atau pengecualian terhadap aspek tertentu. Sementara itu, pada Tahun 2025 terlihat ada peningkatan kualitas penyajian LKPD, khususnya dalam kelengkapan CaLK dan penyesuaian pencatatan aset, yang berdampak positif terhadap penilaian BPK. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan berdampak langsung terhadap peningkatan opini audit.

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan faktor utama yang memengaruhi pendapat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), masih ditemukan kelemahan dalam SPI di Provinsi NTT, terutama pada pengelolaan aset, pengendalian uang, dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Kelemahan tersebut meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelanggaran terhadap aturan, sehingga menjadi dasar pertimbangan BPK dalam memberikan pendapat Audit. Pada Tahun 2024, Kelemahan SPI Masih Tergolong signifikan. Pada tahun 2024, yang terlihat dari temuan yang berulang dari BPK. Namun pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Mulai Berupaya Memperkuat Sistem Pengendalian Internal dengan meningkatkan Peran Inspektorat Daerah, menyempurnakan Prosedur Pengelolaan Aset, Serta Melakukan tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi BPK dari Tahun Sebelumnya. Perbaikan SPI ini Berdampak Positif pada kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Meningkatkan Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam menilai opini audit. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya Terkait Pembelian barang dan jasa serta Pengelolaan Aset. Kondisi ini menjadi salah satu Penyebab Opini BPK Terhadap LKPD Provinsi NTT pada Tahun 2024, dan pada Tahun 2025, Tingkat Kepatuhan meningkat karena adanya peningkatan Pengawasan internal dan juga Pemahaman Pegawai terhadap Aturan Keuangan Daerah. Hal ini Menunjukkan bahwa konsisten dalam menjalankan Aturan serta tindak Lanjut dari Rekomendasi BPK sangat Penting dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Opini Audit.

Faktor sumber daya manusia (SDM) juga sangat memengaruhi hasil opini audit BPK. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa masih banyak aparatur pengelola keuangan yang kurang memahami aturan akuntansi pemerintahan dan sistem Pelaporan Keuangan, Sehingga Menjadi Hambatan. Selain itu, Frekuensi rotasi dan Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan yang tinggi menyebabkan kurangnya kelanjutan dalam Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2024, Keterbatasan Kemampuan SDM ini masih menyebabkan Kesalahan Administratif dan Teknis dalam Penyusunan LKPD. Namun pada Tahun 2025, Peningkatan kompetensi melalui Pelatihan dan Bimbingan mulai menunjukkan hasil Positif, Terutama dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, Serta Mempengaruhi Opini Audit BPK secara Keseluruhan.

Opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dan 2025 memiliki dampak besar terhadap mutu pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK bukan hanya menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, Tetapi juga Menunjukkan Tingkat Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Mengurus Dana Publik. Pada Tahun 2024, Opini BPK menunjukkan masih ada beberapa Kelemahan dalam pengelolaan keuangan Daerah, Terutama dalam Pengelolaan Aset, Sistem Pengendalian Internal yang belum Cukup Efektif, Serta Pemenuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini Menunjukkan Pengelolaan Keuangan Daerah harus diperbaiki secara terus menerus agar LKPD bisa Disajikan dengan andal

dan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Berlaku. Pada TAHUN 2025, terdapat peningkatan BPK dalam menunjukkan adanya Peningkatan sebagai dampak dari tindak Lanjut kepada Rekomendasi BPK dari tahun Sebelumnya. Perbaikan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Dan Peningkatan Internal, dan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia yang Menangani Keuangan, Penguatan Sistem Pengendalian Internal, dan juga Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia yang Menangani keuangan Daerah berkontribusi pada Peningkatan Kualitas Opini Audit. ini menunjukkan Komitmen Pemerintah Daerah untuk Memperbaiki Pengelolaan Keuangan Secara Bertahap dan Berkelanjutan. Perbedaan dan Perkembangan Opini BPK antar Tahun 2024 dan 2025 menunjukan bahwa Opini audit bukan hanya hasil Evaluasi Tahunan, tetapi juga mencerminkan Proses Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh Karena Itu, Konsistensi dalam Menjalankan Rekomendasi BPK Serta Penguatan Pengendalian Internal dan Kemampuan Aparatur Menjadi Faktor Penting dalam Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas Opini Audit Di Masa Depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendapat Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada tahun 2024 masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama terkait pengelolaan aset daerah, sistem pengendalian internal yang belum memadai, serta kesesuaian dengan regulasi keuangan. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan pendapat audit terhadap LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada tahun 2025 terlihat adanya peningkatan dalam kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, yang dipengaruhi oleh tindak lanjut rekomendasi BPK, penguatan peran pengawasan internal, serta peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan. Dengan demikian, pendapat audit BPK tidak hanya sebagai penilaian atas kewajaran laporan keuangan pada periode tertentu, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjalankan rekomendasi BPK, penguatan terhadap sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendapat audit di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Audit, T., & Pemda, U. (n.d.). *DETERMINAN OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA SE-SUMATERA*. 152–160.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2015). *Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Faizal, C., Ni, S., Amalyh, A., Firnanda, I., & Putri, M. R. (2025). *Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia*. 06(01), 169–178.
- Hamel, G., Pengendalian, E. S., Sistem, E., Intern, P., Piutang, T., & Hamel, G. (n.d.). *No Title*. 1(3), 274–281.
- Juli, V. N., Akuntansi, P. P., Sistem, P., Akuntansi, I., Daerah, K., & Peran, D. A. N. (2010). *INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh)* Safrida Yuliani Nadirsyah Usman Bakar *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI*. 3(2).
- Jurnal, I., Vol, A., Oktober, N., Daerah, P., & Jawa, P. (2020). *INVENTORY : Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2 Oktober 2020*. 4(2), 104–117.
- Kompas, T. (2019). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 1–13.
- Muhasaba, E. L., & Akuntansi, J. (2021). 1, 2 1, 2. 12(2), 157–171.
- Wulandari, E. (2021). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Opini Audit , Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit Dampaknya Terhadap Audit Delay Audit Opinion , Company Size and Audit Quality Impact on Audit Delay Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. 8(Maret), 18–26.